

MEMAHAMI EKSISTENSI BURUH

(Perspektif Komunikasi Antarbudaya)

Oleh: Turnomo Rahardjo & Adi Nugroho

Abstract

This research aims to describe the experiences of politicians and labors, who have different class position, in order to understand labors' existence in both group's point of view. It is based on intercultural communication perspective with emphasize on Standpoint Theory. This theory explains that individuals are active consumers of reality themselves, and that their experience is the most significant information source. The research found that diferent class position generates different perspective in order to understand labor's existence. Politician produce symbolic engineering through political messages. In contrast, labor ignored those political messages and they believed that political messages are political propaganda and one-way and monologue in nature.

Keywords: symbolic engineering, political propaganda, monologue.

Pendahuluan

Dalam setiap peristiwa politik seperti pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden/wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah; buruh seperti halnya petani dan nelayan, merupakan kelompok yang selalu menjadi sasaran kelompok lain untuk dimanfaatkan eksistensinya guna mendapatkan keuntungan-keuntungan politik. Partai politik, calon legislatif, kandidat presiden/wakil presiden, gubernur, dan walikota/bupati menjadikan buruh sebagai komoditas politik dalam upaya mereka untuk memperoleh kekuasaan (jabatan-jabatan politik). Dengan dalih perbaikan dan peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi buruh, partai politik dan elite politik berusaha menciptakan situasi yang menegaskan bahwa buruh adalah kelompok yang perlu diberdayakan. Melalui pesan-pesan politik yang dirancang secara sistematis, mereka telah menciptakan sebuah "realitas" yang tampak, meskipun sebenarnya tidak sama dengan realitas yang nyata.

Para politisi telah menciptakan "peristiwa-peristiwa semu" (*pseudo-events*) melalui dramatisasi-dramatisasi tertentu untuk menarik perhatian masyarakat, khususnya buruh sebagai kelompok sasaran kampanye politik. Para politisi tiba-tiba merasa tidak memiliki jarak politik (*political distance*) dan dekat dengan buruh yang menjadi kelompok sasaran mereka. Dalam kenyataan yang sebenarnya, nasib buruh dan *underrepresented group* lainnya

seperti petani dan nelayan tidak kunjung berubah ke arah yang lebih baik. Mereka tetap saja “kalah” dan terpinggirkan oleh struktur sosial, ekonomi, dan politik yang timpang dan tidak adil. Perburuhan adalah persoalan nyata yang sampai saat ini belum mendapatkan alternatif pemecahan yang memadai. Tuntutan buruh untuk pemenuhan hak-hak normatif mereka seperti upah yang layak, hak cuti, jaminan kesehatan, kepastian status terkait dengan masih diberlakukannya sistem kontrak selalu mengemuka dalam setiap aksi unjuk rasa. Selain itu, buruh migran yang bekerja di luar negeri menghadapi persoalan yang sangat serius, yaitu hak untuk dilindungi keselamatan jiwa mereka. Banyak kasus kekerasan yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) seperti penyiksaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan berujung pada kematian.

Studi ini menekankan pada relasi antara politisi dengan buruh. Dalam perspektif komunikasi antarbudaya, *material life* atau posisi kelas akan membentuk dan membatasi pemahaman mengenai relasi sosial (Miller, 2005: 304; West & Turner, 2007: 502-503). Tempat atau wilayah yang berbeda dalam suatu hirarki sosial akan mempengaruhi apa yang dilihat. Pengalaman, pengetahuan, dan perilaku komunikasi orang dibentuk oleh kelompok sosial mereka. Ketika *material life* distrukturkan dalam 2 (dua) cara yang berlawanan untuk kelompok-kelompok yang berbeda, maka pemahaman masing-masing kelompok akan bertentangan satu sama lain. Ketika ada kelompok dominan dan kelompok sub ordinat, maka pandangan dari kelompok dominan akan membentuk relasi material dimana semua kelompok dipaksa untuk berpartisipasi. Sebaliknya, pandangan kelompok yang tertindas akan merepresentasikan perjuangan. Titik pandang kelompok yang terpinggirkan akan lebih jernih dalam memahami “dunia” (realitas) daripada kelompok yang memiliki kekuasaan.

Dalam konteks posisi kelas (*material life*) ini, politisi merupakan pihak yang selalu berusaha memanfaatkan keberadaan buruh dan *underrepresented group* lainnya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan politik guna meraih kekuasaan. Sebaliknya, buruh merupakan kelompok yang terpinggirkan oleh kepentingan politisi. Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang muncul adalah bagaimana politisi sebagai kelompok yang memiliki posisi “lebih tinggi” memahami situasi dan kondisi yang melingkupi kehidupan buruh dan bagaimana buruh sebagai kelompok yang berada pada posisi kelas “lebih rendah” dalam memahami keberadaan mereka. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman politisi dalam memahami keberadaan buruh sebagai “alat” perjuangan politik dan pengalaman buruh dalam memahami posisi sosial mereka.

Dalam tataran konseptual-teoritik, penelitian ini berpijak pada paradigma interpretif, sebuah sistem keyakinan dasar (*basic belief system*) yang digunakan untuk membantu menginterpretasikan dan memahami alasan-alasan dari para pelaku (*social actors*) terhadap tindakan sosial yang mereka lakukan, yaitu cara-cara pelaku mengkonstruksikan kehidupan mereka dan makna yang mereka berikan kepada kehidupan tersebut. Tindakan sosial tidak dapat diamati, tetapi lebih kepada pemaknaan subjektif terhadap tindakan sosial tersebut.

Sejalan dengan paradigma interpretif sebagai landasan filosofis penelitian ini, maka gagasan teoritik yang memiliki keterkaitan dengan paradigma interpretif adalah fenomenologi. Secara konseptual, fenomenologi merupakan studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran, atau cara kita sampai pada pemahaman tentang objek-objek atau kejadian-kejadian yang secara sadar kita alami. Fenomenologi melihat objek-objek dan peristiwa-peristiwa dari sudut pandang seseorang sebagai *perceiver*. Sebuah *phenomenon* adalah penampakan sebuah objek, peristiwa atau kondisi dalam persepsi individu. Asumsi pokok dari fenomenologi adalah bahwa orang secara aktif akan menginterpretasikan pengalaman mereka dengan memberikan makna terhadap apa yang mereka lihat. Interpretasi atau *verstehen* (*understanding*) merupakan proses aktif dalam memberikan makna terhadap sesuatu yang diamati, seperti misalnya sebuah teks, sebuah tindakan atau suatu situasi yang kesemuanya dapat disebut sebagai pengalaman (*experience*). Karena sebuah pesan atau tindakan lain dapat bermakna banyak hal, maka makna tidak dapat secara sederhana “ditemukan” (*discovered*). Interpretasi, berdasarkan definisinya, merupakan sebuah proses aktif dari pikiran (*mind*), sebuah tindak kreatif dalam mencari berbagai kemungkinan makna.

Salah satu pemikiran teoritik yang menjadi landasan berpikir dalam penelitian ini adalah *Standpoint Theory* dari Nancy C.M. Hartsock (West & Turner, 2007: 499). *Standpoint* bisa dipahami sebagai posisi seseorang yang didasarkan pada lokasi sosial. Teori ini memberikan kerangka untuk memahami sistem kekuasaan. Kerangka ini dibangun atas dasar pengetahuan yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari orang, mengakui bahwa individu-individu adalah konsumen aktif dari realitas mereka sendiri, dan bahwa individu-individu itu sendiri merupakan sumber informasi yang paling penting mengenai pengalaman mereka. Teori *Standpoint* memberikan kewenangan kepada suara pribadi individu, menegaskan bahwa pengalaman, pengetahuan, dan perilaku komunikasi orang sebagian besar dibentuk oleh kelompok sosial dimana mereka bergabung. Teori *Standpoint* mengilustrasikan sentralitas komunikasi dalam membentuk dan menyalurkan sikap serta menunjuk pada

kegunaan komunikasi sebagai alat untuk mengubah *status quo* dan memproduksi perubahan (West & Turner, 2007: 508-509).

Gagasan teoritik lain yang menjadi pijakan berpikir dalam studi ini adalah *Co-cultural Theory* dari Mark Orbe dan kawan-kawan (Gudykunst dalam Gudykunst & Mody (ed.), 2002: 190-191). *Co-cultural* merupakan pemikiran teoritik yang menjelaskan tentang perlunya kesetaraan budaya. Mark Orbe dan kawan-kawan memilih kata *co-cultural* daripada terminologi *subcultural*, *subordinate*, dan *minority*, karena istilah *co-cultural* ingin menunjukkan bahwa tidak ada satu pun budaya dalam masyarakat yang lebih unggul terhadap budaya yang lain. Teori *Co-cultural* dilandasi oleh pemikiran teoritik *Muted Group* (Cheris Kramarae) dan *Standpoint*. Teori *Muted Group* (Miller, 2005: 306; West & Turner, 2007: 515) menjelaskan bahwa bahasa memberikan kepada para penciptanya (dan orang yang mempunyai kelompok yang sama seperti penciptanya) kondisi yang lebih baik daripada orang dari kelompok lain yang harus mempelajari menggunakan bahasa sebaik yang mereka bisa. Kelompok yang dibisukan menciptakan bahasa mereka sendiri untuk mengkompensasikan persoalan-persoalan mereka.

Menurut Orbe dan kawan-kawan, komunikasi *co-cultural* merujuk pada interaksi diantara para anggota kelompok *underrepresented* dengan kelompok dominan. Fokus dari Teori *Co-cultural* adalah memberikan sebuah kerangka dimana para anggota *co-cultural* menegosiasikan usaha-usaha untuk menyampaikan suara diam mereka dalam struktur masyarakat dominan. Teori *Co-cultural* memiliki 2 (dua) premis, yaitu 1) para anggota *co-cultural* terpinggirkan (*marginalized*) dalam struktur masyarakat dominan, dan 2) para anggota *co-cultural* menggunakan gaya-gaya komunikasi tertentu untuk meraih keberhasilan ketika berhadapan dengan “struktur-struktur dominan yang opresif”. Pada umumnya para anggota *co-cultural* memiliki satu dari tiga tujuan ketika berinteraksi dengan para anggota kelompok dominan, yaitu *assimilation* (menjadi bagian dari kultur dominan), *accomodation* (berusaha agar para anggota kelompok dominan dapat menerima para anggota *co-cultural*), dan *separation* (menolak kemungkinan ikatan bersama dengan para anggota kelompok dominan).

Metoda Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif guna mendapatkan gambaran tentang interpretasi atau pemaknaan yang dilakukan politisi dan buruh dalam memahami keberadaan buruh. Subjek penelitiannya adalah para politisi yang menjadi anggota legislatif DPRD Kota Semarang yang bertugas dalam Komisi Kesejahteraan Rakyat, organisasi buruh/serikat pekerja, dan perwakilan buruh.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan subjek penelitian. Sedangkan data sekunder didapat dari kajian pustaka yang relevan dengan studi yang dilakukan. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metoda fenomenologi. Kualitas penelitian (*goodness criteria*) diukur berdasarkan nilai *authenticity*, yaitu apabila peneliti dapat melakukan identifikasi empatik (*emphatic identification*), sebuah tindakan untuk menghidupkan kembali secara psikologis pikiran pelaku (*actor*) guna memahami motif, keyakinan, keinginan, dan pikiran dari pelaku tersebut. Ringkasnya, kualitas penelitian ini diukur dari sejauhmana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial (politisi dan buruh).

Hasil Penelitian

1. Pengalaman Politisi Dalam Memahami Keberadaan Buruh:

Para politisi yang menjadi informan dalam studi ini mengatakan bahwa buruh adalah kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan, karena kondisi mereka yang masih memprihatinkan. Penghasilan (upah) yang diterima buruh masih sebatas untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi, sedangkan kebutuhan non ekonomi seperti kesehatan dan pendidikan belum bisa terpenuhi dengan penghasilan yang diterima buruh sekarang ini. Buruh juga menghadapi persoalan yang terkait dengan kepastian status sehubungan dengan masih diberlakukannya sistem kontrak.

Dalam mencermati persoalan-persoalan yang dihadapi buruh, mereka mengaku sudah berusaha memperjuangkan perubahan nasib buruh melalui lembaga legislatif dengan memfasilitasi komunikasi antara buruh, pengusaha, dan dinas ketenagakerjaan, meskipun belum banyak yang bisa dilakukan.

2. Pengalaman Politisi Dalam memahami Keberadaan Buruh Sebagai Komoditas Politik:

Dalam pandangan politisi, menjadikan buruh sebagai komoditas politik merupakan hal yang wajar, karena suara buruh itu nyata (*real*). Praktik “menjual” buruh dan kelompok masyarakat lainnya seperti petani dan nelayan memang lazim dilakukan tidak saja oleh partai politik, tetapi juga kandidat presiden hingga calon walikota/bupati.

Para politisi meyakini bahwa menjadikan buruh sebagai komoditas politik sulit untuk diukur keberhasilannya, karena partai politik yang secara tegas mengatasnamakan buruh, perolehan suaranya dalam pemilihan umum tidak signifikan. Selain itu, para pemilih tidak terkecuali buruh sekarang ini cenderung pragmatis dalam menggunakan hak pilih mereka. Pragmatisme dalam konteks penggunaan hak pilih dimaknai apakah ada “imbangan ekonomi” yang bisa diberikan oleh partai politik kepada warga masyarakat yang menjadi sasaran dari partai politik yang bersangkutan.

3. Pengalaman Komunikasi Politisi Dengan Buruh:

Komunikasi antara politisi dengan buruh tidak berlangsung secara rutin dalam sebuah forum yang memang secara khusus dirancang untuk membicarakan persoalan-persoalan perburuhan. Para politisi mengakui bahwa selama ini melalui lembaga DPRD Kota Semarang (Komisi Kesejahteraan Rakyat) selama ini masih sebatas menjadi fasilitator dengan mempertemukan buruh dengan pengusaha dan dinas ketenagakerjaan untuk mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi buruh.

Dalam catatan pengalaman politisi, komunikasi lebih intensif dengan buruh justru berlangsung di partai (PKS Kota Semarang). Informan menjelaskan bahwa partainya menjalin kerjasama dengan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Semarang yang dimulai sejak terjadinya kontrak politik pada pemilihan umum 2004. Komunikasi yang berlangsung lebih ditekankan pada dukungan yang diberikan oleh partai terhadap praktik-praktik komunikasi (advokasi, unjuk rasa) yang dikoordinasikan oleh SPN Kota Semarang.

4. Pengalaman Buruh Terhadap Kondisi Buruh:

Dalam catatan pengalaman aktivis buruh dan buruh, kondisi buruh di Kota Semarang tidak mengalami perubahan yang cukup berarti. Buruh masih dihadapkan pada persoalan pemenuhan hak-hak normatif yang belum sesuai dengan harapan mereka. Selain itu, buruh juga dihadapkan pada persoalan kepastian status mereka. Pemberlakuan sistem kontrak di perusahaan-perusahaan banyak merugikan buruh, karena posisi mereka dalam sistem kontrak tersebut sangat lemah dan rentan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK).

Serikat buruh, dalam catatan informan, belum mampu menjalankan perannya secara optimal karena tidak cukup memiliki kekuatan tawar menawar (*bargaining power*) yang memadai ketika berhadapan dengan pengusaha. Ada relasi kuasa yang tidak setara. Serikat buruh terkesan sekadar ada, para pengurus serikat buruh sebatas menyampaikan usulan, namun keputusan tetap berada ditangan pengusaha. Para pengurus juga cenderung mencari posisi aman agar keberadaan mereka sebagai bagian dari perusahaan tetap terjaga. Mereka pada akhirnya lebih memilih bersikap pasif dan tidak terlalu membela kepentingan buruh.

5. Pengalaman Buruh Dalam Memahami Keberadaan Politisi.

Para informan menyadari bawa nasib mereka selalu “diperjuangkan” oleh politisi, terutama menjelang pemilihan umum. Mereka sudah terbiasa mendengar janji-janji politisi dan tidak percaya dengan pesan-pesan politik yang disampaikan politisi tersebut. Salah satu informan menjelaskan bahwa keputusan partai politik untuk “membela” buruh hanya disampaikan menjelang pemilihan umum. Buruh diperlakukan tidak lebih sebagai “barang dagangan” dalam sebuah “pasar politik” yang kompetitif.

Praktik memperlakukan buruh sebagai komoditas politik selalu berulang dalam setiap peristiwa politik menjelang pemilihan umum, sehingga menurut informan, lambat laun telah menumbuhkan ketidakpercayaan buruh kepada partai politik dan politisinya. Bahkan, sebuah organisasi buruh menolak pemilihan umum, karena dinilai tidak mampu merubah keadaan masyarakat menjadi lebih baik, nasib buruh yang diperjuangkan partai politik dan politisi tidak kunjung berubah.

6. Pengalaman Komunikasi Buruh Dengan Politisi:

Dalam catatan pengalaman informan, selama ini tidak atau belum ada forum komunikasi antara buruh dengan politisi yang berlangsung secara teratur. Interaksi hanya terjadi secara insidental ketika muncul persoalan-persoalan yang dihadapi buruh yang biasanya distimuli melalui pemberitaan media massa. Komunikasi antara buruh dengan politisi lebih bersifat searah (monolog). Buruh lebih ditempatkan pada posisi sebagai pihak yang mengadukan persoalan-persoalan yang dihadapi (posisi buruh sebagai sub ordinat), sedangkan politisi berada pada posisi yang lebih menekankan pada pihak yang berusaha mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi buruh (posisi politisi sebagai *superior*).

Informan menilai bahwa komunikasi antara mereka dengan politisi bersifat artifisial, karena politisi sekadar memanfaatkan buruh untuk mendapatkan dukungan suara. Dalam situasi komunikasi yang artifisial ini, buruh tidak lagi bisa mempercayai pesan-pesan politik yang disampaikan politisi. Mereka tidak terlalu berharap dengan pesan-pesan “perubahan” yang dijanjikan oleh politisi.

Pembahasan

1. Pengalaman Politisi dan Buruh Dalam Memahami Keberadaan Buruh:

Apabila dilihat kembali pengakuan atau pengalaman para informan, baik politisi maupun buruh dalam memahami keberadaan buruh, terlihat ada kesamaan pandangan diantara mereka, meskipun dengan penekanan yang berbeda. Politisi merasa berada pada posisi sosial yang lebih tinggi dalam menuturkan pengalamannya mengenai keberadaan buruh, sedangkan buruh merasa dalam posisi sosial yang lebih rendah dalam mengekspresikan pengalamannya tentang eksistensi mereka (*superior versus inferior*).

Para politisi menegaskan bahwa buruh merupakan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan, karena hingga saat ini kondisi mereka belum mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Buruh, dalam pandangan politisi, masih dihadapkan pada persoalan upah yang rendah, hak untuk cuti yang tidak bisa dilaksanakan dengan semestinya, dan ketidakpastian status mereka karena masih diberlakukannya sistem kontrak. Pandangan yang sama tentang persoalan-persoalan yang melingkupi eksistensi buruh juga disampaikan oleh

aktivis buruh dan buruh itu sendiri. Mereka menegaskan bahwa kondisi buruh belum mengalami perubahan yang cukup berarti, karena hak-hak normatif buruh belum bisa dipenuhi sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan cara berpikir *Standpoint* (Miller, 2005; West & Turner, 2007), pandangan yang sama dari 2 (dua) kelompok yang berada pada posisi sosial yang berbeda sebenarnya ingin menegaskan bahwa setiap individu yang berada di tempat-tempat berbeda dalam suatu hirarki sosial, berusaha untuk memahami situasi sosial (dalam konteks penelitian ini adalah kondisi yang melingkupi keberadaan buruh), berdasarkan pada titik pandang yang menguntungkan. Sebab, individu-individu adalah konsumen aktif dari realitas mereka sendiri, dan individu-individu itu sendiri merupakan sumber informasi yang paling penting mengenai pengalaman mereka.

Dalam konteks titik pandang yang menguntungkan ini dapat dijelaskan bahwa politisi yang berada pada posisi sosial yang “tinggi” berusaha untuk membentuk relasi-relasi material dimana semua kelompok “dipaksa” untuk berpartisipasi. Melalui penegasan bahwa buruh perlu diberdayakan, sebenarnya politisi berusaha “memaksa” pihak-pihak lain seperti pengusaha dan lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan persoalan ketenagakerjaan untuk berpartisipasi dalam penanganan persoalan-persoalan perburuhan. Pada sisi yang lain, buruh yang berada dalam posisi sosial “rendah” berusaha untuk merepresentasikan tindakan-tindakan yang mereka lakukan sebagai sebuah ekspresi perjuangan. Melalui advokasi, unjuk rasa, mogok kerja, dan sebagainya mereka berusaha untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan dari “penguasa” (pemerintah, pengusaha) yang tidak berpihak kepada mereka. Inilah bentuk perjuangan yang dilakukan oleh buruh, karena selama ini mereka merasa terpinggirkan oleh struktur politik, ekonomi, dan sosial yang timpang dan tidak adil. Titik pandang orang (buruh) yang terpinggirkan akan lebih jernih dalam memahami “dunia” (realitas) daripada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.

Buruh, dalam pemikiran teoritik *Co-cultural* dari Mark Orbe dan kawan-kawan (Gudsykunst dalam Gudykunst & Mody (ed), 2002) merupakan kelompok yang terpinggirkan (*underrepresented group*) akibat struktur sosial, ekonomi, dan sosial yang tidak adil. Fokus dari teori *Co-cultural* adalah memberikan kerangka dimana para anggota *co-cultural* menegosiasikan usaha-usaha untuk menyampaikan suara diam mereka dalam struktur

masyarakat yang dominan. Komunikasi *co-cultural* merujuk pada interaksi antara para anggota *underrepresented* dengan kelompok dominan.

Perjuangan yang dilakukan buruh melalui praktik komunikasi yang mereka lakukan seperti advokasi, unjuk rasa, mogok kerja dan sebagainya merupakan bagian dari upaya mereka ketika berhadapan dengan apa yang disebut dalam Teori *Co-cultural* sebagai “struktur-struktur dominan yang opresif”. Wujud nyata dari struktur-struktur dominan yang opresif adalah kebijakan-kebijakan perburuhan yang tidak berpihak kepada buruh, pengusaha dan pemilik perusahaan yang lebih memberi penekanan pada relasi ekonomi daripada relasi kemanusiaan. Buruh mengekspresikan suara diam mereka agar struktur-struktur dominan yang represif itu bersedia untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan buruh.

Akomodasi adalah salah satu strategi yang digunakan oleh kelompok *underrepresented* (buruh) ketika menjalin komunikasi dengan kelompok dominan. Strategi komunikasi lainnya adalah *asimilasi*, terjadi ketika kelompok *underrepresented* pada akhirnya menjadi bagian dari kultur kelompok dominan. Pilihan strategi komunikasi lainnya adalah *separation*, terjadi ketika kelompok *underrepresented* menolak ikatan bersama dengan kelompok dominan. Dalam konteks penelitian ini nampaknya strategi komunikasi *asimilasi* lebih mengemuka, terlihat dari ketidakberdayaan serikat buruh dan buruh ketika berhadapan dengan pengusaha atau pemilik perusahaan. Mengubah *status quo* dan memproduksi perubahan yang dilakukan buruh masih memerlukan waktu yang relatif panjang.

Dalam situasi seperti ini sebenarnya telah terjadi relasi komunikasi yang tidak setara antara buruh dengan pengusaha, sebuah relasi antara *superior* dengan *subordinate*. Dalam kajian komunikasi, relasi antara buruh dengan pengusaha sebenarnya wujud dari tidak hadirnya *dialog*, ekspresi yang lebih mengemuka dalam komunikasi antara buruh dengan pengusaha adalah *monolog*. Dalam pemikiran filsuf Martin Buber (dalam Littlejohn & Foss, 2005), monolog adalah wujud dari hubungan Aku – Itu (I – It). Dalam hubungan Aku – Itu, kita memperlakukan orang lain sebagai benda yang digunakan, sebuah obyek yang dimanipulasikan. Sebaliknya, dialog dipahami sebagai hubungan Aku – Engkau (I – Thou). Dalam hubungan Aku – Engkau, kita menghormati orang lain sebagai subyek dan memperlakukannya sebagai pihak yang berharga.

2. Pengalaman Politisi dan Buruh Dalam Memahami Keberadaan Buruh Sebagai Komoditas Politik:

Mengapa buruh memiliki “daya tarik” bagi para politisi? Dalam catatan politisi yang menjadi informan penelitian ini, suara buruh itu nyata. Buruh adalah kelompok yang potensial untuk mendulang suara, sehingga menjadi sangat wajar bila politisi memanfaatkan keberadaan buruh. Hampir semua partai politik untuk tidak menyebut semua, berusaha untuk menyusun program-program politik pro buruh. Pada sisi yang lain, buruh yang menjadi informan penelitian ini sangat menyadari bahwa diri mereka memang “dimanfaatkan” sebagai “alat” para politisi untuk mendapatkan dukungan.

Merujuk pada gagasan pemikiran *Muted Group* (West & Turner, 2007), buruh seperti halnya perempuan adalah kelompok yang dibisukan, karena “bahasa” (kebijakan-kebijakan tentang perburuhan) diciptakan oleh “laki-laki” (pemerintah, anggota legislatif, pengusaha, dan pemilik perusahaan) sebagai pihak-pihak yang lebih dominan. “Bahasa” atau suara buruh kurang terartikulasikan dalam wilayah publik, sehingga buruh sebagai kelompok yang dibisukan menciptakan bahasa mereka sendiri untuk mengkompensasikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi dengan “bahasa” dari kelompok dominan.

Berdasarkan perspektif buruh, pesan-pesan atau janji-janji politik sudah terbiasa mereka dengar, terutama pada saat kampanye pemilihan umum. Mereka tidak percaya terhadap pesan-pesan politik yang disampaikan oleh para politisi, karena komitmen untuk membela dan memperjuangkan nasib buruh hanya disampaikan menjelang pemilihan umum. Dalam cara pandang teoritik, pesan (bahasa) politik tidak bisa dipahami sebagai medium netral yang dipakai untuk menjelaskan realitas sosial-politik. Ketika bahasa dipakai untuk kepentingan-kepentingan politik sebagaimana yang dilakukan oleh para politisi menjelang pemilihan umum, maka sesungguhnya bahasa sudah tidak objektif lagi, karena bahasa sudah tercelup oleh kepentingan ideologi (*ideological soaked*). Bahasa sudah mengarah kepada keberpihakan, dan ini merupakan wujud atau bentuk dari sebuah rekayasa simbolik yang berkaitan dengan persoalan kekuasaan. Mochtar Pabottingi, pakar ilmu politik, mengatakan bahwa bahasa tidak sekadar dilihat sebagai alat, tetapi juga dipandang sebagai paradigma. Pandangan bahasa sebagai paradigma memberikan suatu gambaran bahwa bukan manusia yang memakai bahasa, tetapi justru bahasa yang memakai manusia, bahasa yang menentukan kita.

Pesan-pesan politik yang disampaikan oleh para politisi dalam pemilihan umum untuk memperjuangkan kondisi buruh yang lebih sejahtera tidak bisa lagi dipahami sebagai ekspresi yang steril dari kepentingan-kepentingan untuk mendapatkan kekuasaan, karena janji-janji politik dari politisi adalah cerminan dari bahasa kekuasaan, pengungkapan diri yang tidak dilandasi oleh hadirnya komunikasi yang tulus (*genuine communication*).

Dalam kajian komunikasi politik (Nimmo dalam Hamad: “Memahami Komunikasi Pemasaran Politik”, Jurnal Komunikasi Mediator Vol. 9 No. 1, Juni 2008), pesan politik dapat disampaikan melalui penggunaan lambang-lambang politik (*political symbols*). Wujud dari penggunaan lambang-lambang politik tersebut adalah pembicaraan politik (*political talks*) yang dapat dipilah ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu pembicaraan kekuasaan (*power talk*), pembicaraan kewenangan (*authority talk*), dan pembicaraan pengaruh (*influence talk*).

Pembicaraan kekuasaan dilakukan dengan cara mengancam atau memberikan janji-janji politik, sedangkan pembicaraan kewenangan menekankan pada aktivitas memberi perintah dan larangan; dan pembicaraan pengaruh berkaitan dengan aktivitas memberi nasihat, dorongan, permintaan, dan peringatan. Pesan atau janji politik tentang keberpihakan kepada buruh yang disampaikan oleh para politisi dalam pemilihan umum, secara konseptual dapat dipahami sebagai *power talks*, yaitu pembicaraan mengenai kekuasaan yang dilakukan melalui janji-janji. Dalam konteks penelitian ini, janji-janji politik yang disampaikan para politisi lebih dipahami sebagai propaganda politik daripada komunikasi pemasaran politik. Propaganda adalah upaya mempengaruhi orang lain secara searah dengan memanfaatkan sentimen norma kelompok. Sedangkan komunikasi pemasaran politik dimengerti sebagai kegiatan persuasi, yaitu usaha mempengaruhi persepsi dan kesan orang dengan mengeksplorasi perasaan, kepribadian, kerangka pikir, dan sebagainya. Persuasi membuka peluang adanya dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam tindak komunikasi politik.

3. Pengalaman Komunikasi Buruh dengan Politisi:

Jika dilihat kembali pengakuan tentang pengalaman komunikasi yang berlangsung antara buruh dengan politisi, terlihat ada perbedaan antara pandangan politisi dengan pandangan buruh. Politisi yang menjadi informan penelitian ini mengatakan bahwa mereka

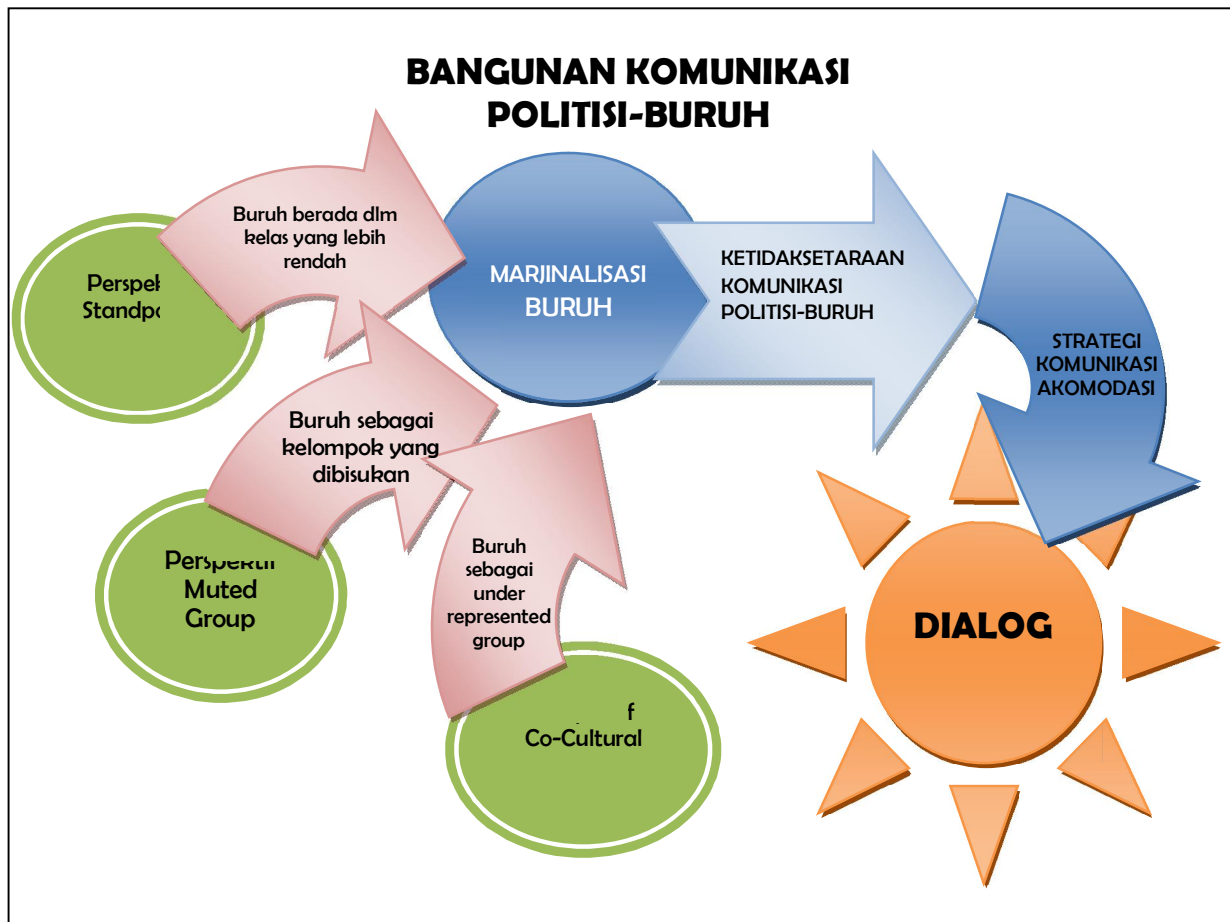
menjalin komunikasi dengan buruh, meskipun tidak berlangsung secara teratur. Dalam kapasitas mereka sebagai anggota legislatif DPRD Kota Semarang, selama ini mereka masih sebatas bertindak sebagai fasilitator untuk mempertemukan buruh dengan pengusaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi buruh.

Dalam pandangan yang berbeda, aktivis buruh dan buruh menegaskan bahwa kalau pun ada jalinan komunikasi antara politisi dengan buruh, komunikasi yang berlangsung hanya dipermukaan saja. Mereka mengatakan bahwa komunikasi antara politisi dengan buruh tidak pernah menyelesaikan persoalan yang dihadapi buruh secara tuntas. Bahkan, seorang informan mengatakan bahwa anggota legislatif lebih mengakomodasi kepentingan pengusaha. Tidak pernah ada dialog antara buruh dengan politisi, karena politisi memang tidak sungguh-sungguh memperjuangkan nasib buruh. Keputusan untuk “membela” buruh hanya diucapkan menjelang pemilihan umum guna mendapatkan dukungan suara dari buruh.

Salah satu prinsip dasar dalam komunikasi mengatakan bahwa kita berkomunikasi *dengan* orang lain (*communicate with others*), lebih dari sekadar berkomunikasi *untuk* orang lain (*communicate to others*). Prinsip dasar ini ingin menegaskan bahwa komunikasi perlu dipahami dalam lingkup kesetaraan, karena setiap pihak yang terlibat dalam komunikasi memiliki kontribusi yang sama untuk mencapai tujuan komunikasi, yaitu pengertian bersama (*mutual understanding*) atau kesamaan makna (*commonness*). Dalam konteks komunikasi antara politisi dengan buruh terlihat adanya relasi yang tidak setara, bahkan tidak memanusiakan (*inhumanity*). Politisi menciptakan komunikasi yang artifisial (dibuat-buat, tidak sungguh-sungguh), sekadar mengekspresikan bahwa mereka sudah memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi buruh. Praktik komunikasi yang dilakukan politisi ini berpotensi menciderai (*harmful*) buruh sebagai kelompok yang terpinggirkan. Dalam relasi yang tidak memanusiakan ini, buruh sebagai kelompok yang tertindas akan bergerak untuk memperjuangkan “dunia” (realitas) yang lebih baik dan lebih adil. Sebab, buruh sebagai kelompok yang menempati “anak tangga” yang lebih rendah dalam suatu hirarki sosial cenderung lebih memahami situasi sosial lebih utuh daripada pihak lain yang berada di “anak tangga” lebih tinggi.

Dialog, akhirnya menjadi kata kunci dalam relasi komunikasi antara politisi dengan buruh. Dialog tidak saja mampu mengakomodasi terciptanya kesetaraan diantara pihak-pihak

yang berkomunikasi, namun yang lebih penting adalah bahwa dialog memungkinkan lahirnya *heteroglossia, many voices*, sehingga topik-topik perburuhan yang diperbincangkan tidak menjadi dogmatis. Dialog adalah pengayaan bersama (*mutual enrichment*) terhadap topik-topik perburuhan yang dibicarakan.



Penutup

Kesimpulan:

1. Politisi lebih memahami keberadaan buruh dalam konteks politik, yaitu bagaimana memanfaatkan persoalan-persoalan yang dihadapi buruh sebagai komoditas politik. Pada sisi yang lain, praktik-praktik komunikasi (advokasi, unjuk rasa, mogok kerja) yang dilakukan buruh merupakan ekspresi dari perjuangan. Buruh mewujudkan perjuangan mereka melalui praktik-praktik komunikasi tersebut guna mengubah *status quo* dan memproduksi perubahan.

2. Buruh dalam keberadaannya merupakan kelompok yang terpinggirkan ketika berhadapan dengan struktur-struktur dominan yang opresif. Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud dengan struktur-struktur dominan yang opresif adalah regulasi perburuhan yang cenderung tidak berpihak kepada buruh, anggota legislatif yang memanfaatkan buruh sebagai komoditas politik, dan pengusaha yang lebih mementingkan relasi ekonomi daripada relasi kemanusiaan.
3. Dalam menghadapi struktur-struktur dominan yang opresif, buruh menggunakan strategi akomodasi. Melalui penggunaan strategi komunikasi akomodasi ini, buruh berusaha agar regulasi perburuhan, perilaku politisi, dan pengusaha dapat mengakomodasikan kepentingan-kepentingan mereka, meskipun dalam realitasnya buruh tidak cukup memiliki kekuatan ketika berhadapan dengan struktur-struktur dominan yang opresif tersebut.
4. Relasi komunikasi antara politisi dengan buruh berlangsung dalam suasana yang monolog. Buruh sekadar dipakai sebagai “alat” politisi untuk mendapatkan kekuasaan. Politisi sekadar menjadi fasilitator komunikasi dalam penanganan persoalan-persoalan perburuhan.
5. Buruh adalah komoditas politik, mereka tidak mempercayai janji-janji politisi. Pesan-pesan politik yang disampaikan para politisi sangat normatif. Pesan-pesan politik dari politisi sudah terdistorsi oleh kepentingan kekuasaan.
6. Pesan-pesan politik dari politisi lebih dipahami sebagai propaganda politik yang bersifat searah daripada komunikasi pemasaran politik yang lebih menekankan pada pentingnya dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi.
7. Komunikasi antara politisi dengan buruh terjadi secara artifisial, tidak berlangsung dengan sesungguhnya, sekadar mengesankan bahwa politisi memiliki perhatian pada nasib yang dialami buruh. Komunikasi yang artifisial ini berpotensi menciderai buruh sebagai kelompok yang selama ini terpinggirkan.

Implikasi Hasil Studi:

1. Secara akademis, pemikiran-pemikiran teoritik komunikasi budaya: Standpoint, Muted Group, dan Co-cultural bisa memberikan penjelasan yang komprehensif

tentang relasi antara politisi dengan buruh. Politisi yang berada dalam posisi kelas yang lebih tinggi telah memperlakukan buruh secara tidak setara dengan menjadikan buruh sebagai komoditas politik melalui praktik komunikasi yang artifisial.

Komitmen politisi untuk memperjuangkan nasib buruh perlu dipertanyakan, karena perilaku komunikasi politik mereka tidak mengalami perubahan, sekadar memanfaatkan buruh untuk kepentingan meraih kekuasaan. Komunikasi politik antara politisi dengan buruh merupakan ekspresi dari monolog, sebatas memperlakukan buruh sebagai objek politik guna mendapatkan kekuasaan politik.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan penjelasan bahwa perbedaan posisi kelas antara buruh dengan politisi telah menciptakan ketidaksamaan cara pandang dalam memahami keberadaan buruh. Posisi kelas dari politisi yang lebih tinggi memungkinkan mereka dapat melakukan rekayasa simbolik melalui janji-janji politik yang tersusun secara sistematis dengan memanfaatkan buruh sebagai komoditas politik.

Pada sisi yang lain, buruh memahami keberadaan mereka sebagai kelompok yang memperjuangkan nasibnya sendiri tanpa harus memperhatikan praktik komunikasi politik yang dilakukan para politisi dalam setiap berlangsungnya peristiwa politik pemilihan umum, karena politisi sekadar melakukan propaganda politik melalui aktivitas penyampaian pesan-pesan politik mereka.

3. Secara sosial, penelitian ini mampu memberikan penjelasan tentang perlunya pendidikan politik tidak saja bagi para politisi, tetapi juga warga masyarakat lain, terutama kelompok-kelompok *underrepresented* seperti buruh, petani, dan nelayan yang selama ini sekadar dimanfaatkan keberadaan mereka sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan.

Bagi para politisi, pendidikan politik akan memberi pengetahuan kepada mereka tentang pentingnya komunikasi yang etis (dialog) dalam setiap upaya mereka untuk mendapatkan kekuasaan. Bagi kelompok-kelompok *underrepresented*, pendidikan politik merupakan sarana untuk memberikan kesadaran kepada mereka tentang pentingnya posisi kelompok-kelompok *underrepresented* dalam kehidupan politik, sehingga mereka dapat memiliki kekuatan tawar-menawar (*bargaining power*) yang

memadai ketika berhadapan dengan para politisi yang ingin memanfaatkan keberadaan kelompok-kelompok *underrepresented* untuk kepentingan memperoleh kekuasaan.

Daftar Pustaka

- Denzin, Norman K. & Yvonna S. Lincoln (ed). *The Sage Handbook of Qualitative Research, Third Edition*, Thousand Oaks, California, Sage Publications, Inc., 2005
- Griffin, Em. *A First Look At Communication Theory, Sixth Edition*, New York, McGraw-Hill, 2006.
- Gudykunst, William B. "Intercultural Communication Theories" dalam William B. Gudykunst & Bella Mody (ed). *Handbook of International and Intercultural Communication, Second Edition*, Thousand Oaks, California, Sage Ppublications, Inc., 2002.
- Littlejohn, Stephen W. *Theories of Human Communication, Seventh Edition*, Belmont, California, Wadsworth Publishing Company, 2002.
- Littlejohn, Stephen W. & Karen A. Foss. *Theories of Human Ccommunication, Eighth Edition*, Belmont, California, Wadsworth a division of Thomson Learning, Inc., 2005.
- Littlejohn, Stephen W. & Karen A. Foss. *Theories of Human Ccommunication, Ninth Edition*, Belmont, California, Wwadsworth Publishing Company, 2008.
- Miller, Katherine. *Communication Theories, Perspective, Processes, and Contexts, Second Edition*, New York, The McGraw-Hill Companies, Inc., 2005.
- Mochtar Pabottingi. "Bahasa, Politik, dan Otosentrisitas dalam Yudi Latif & Idi Subandy Ibrahim (ed), *Bahasa dan Kekuasaan*, Bandung, Penerbit Mizan, 1996.
- Moustakas, Clark. *Phenomenological Research Methods*, London, Sage Publications, Inc., 1994.
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods, Qualitative and Quantittative Approaches, Third Edition*, Boston, Allyn & Bacon A Viacom Company, 1997.
- Rogers, Everett M., Thomas M. Ssteinfatt. *Intercultural Communication*, Illinois, Waveland Press, Inc., 1999.
- Sarantakos, Sotirios. *Social Research*, South Melbourne, Macmillan Education Australia, 1993.
- Ting-Toomey, Stella. *Communicatting Across Cultures*, New York, The Guilford Publications, Inc., 1999.

West, Richard & Lynn H. Turner. *Introducing Communication Theory, Analysis and Application*, New York, TheMcGraw-Hill Companies,, Inc., 2007.

Artikel:

Ibnu Hamad. “Memahami Komunikasi Pemasaran Politik” dalam Jurnal Komunikasi Mediator FIKOM Universitas Islam Bandung Volume 9 Nomor 1 Juni 2008.

Wahyu Susilo. “Buruh Migran sebagai Tumbal”, *Harian Kompas* 15 Juni 2009.